

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan analisis peneliti maka kesimpulan yang dapat diberikan berkaitan dengan Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program BSPS di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam hal proses pembuatan keputusan sudah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan program BPSB mulai dari tahapan Sosialisasi, Verifikasi, Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), Survei toko bangunan, penentuan Toko bangunan dan sebagainya, yang dicatat dalam berbagai berita acara dalam setiap tahapannya. Dalam setiap tahapan yang disebutkan tersebut, penerima bantuan bisa memberikan usulan, pendapat dan hasil diskusi rapat tersebut menjadi kesepakatan bersama, artinya pendapat atau gagasan masyarakat sangat diterima dan berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan BPSB. Namun dalam sosialisasi yang dilakukan terkadang sangat minim karena adanya pandemi covid-19 sehingga harus mengurangi interaksi langsung apalagi yang menimbulkan kumpulan massa yang banyak dan pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah layak huni yang dibangun sesuai kaidah-kaidah konstruksi tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan sebagian penerima bantuan dan tukang bangunan terkadang tidak hadir dan mewakilkan kepada pihak lainnya dalam kegiatan rapat sosialisasi, rapat penyuluhan, dan acara rembuk-rembug warga penerima bantuan.
2. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan berjalan kurang baik karena TFL dan Korkab melakukan pembekalan tentang kualitas rumah dan teknik konstruksi kepada tukang/pekerja dan penerima bantuan. Namun sebagian ada tukang yang

tidak ikut rapat bimtek, sehingga pengerjaan rumah tidak sesuai kaidah konstruksi. Anggaran program BSPS memang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan anggaran yang digunakan bahkan pencairan anggaran toko dan upah tukang juga lambat, sehingga banyak penerima yang meminta bantuan tenaga dari tetangga, saudara dan anak-anaknya untuk ikut berpartisipasi membangun rumah tapi karena tetap kekurangan dana akhirnya beberapa rumah pembangunannya berhenti sementara dan pengerjaannya juga tidak berkualitas karena menggunakan tukang dadakan dan tidak profesional.

Ketika bahan bangunan yang dianggarkan seringkali memang tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dalam membangun rumah, maka Penerima bantuan banyak yang meminjam uang kepada saudara atau tetangga atau Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan seringkali mereka memanfaatkan barang material yang ada dirumahnya walupun bekas namun masih bisa dipakai kembali. Kondisi real dilapangan juga sering ditemukan kasus penerima bantuan mengurangi pembelian dan penggunaan besi untuk konstruksi bangunan yang sesuai standar dikarenakan anggaran BSPS maupun swadaya mereka tidak cukup sehingga pembangunan rumah BSPS belum memenuhi keandalan bangunan. Namun dalam tahap pelaksanaan Penerima bantuan juga dapat memberikan gagasan usulan berupa memberikan informasi berupa pengalaman teknik dalam membangun rumah dengan biaya yang murah karena anggaran program BSPS yang terbatas. namun tetap mematuhi aturan-aturan teknis membangun rumah dari pemerintah.

3. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat sebagian besar sudah mendapatkan hasil manfaat yang baik dalam pelaksanaan program BSPS ini hal ini terlihat dengan adanya dampak yang dirasakan masyarakat dengan

meningkatnya perputaran roda ekonomi dalam hal pembelian bahan material dan produk umkm, penyerapan tenaga kerja serta terbangunnya rumah yang layak huni.

4. Partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pengawasan dan evaluasi program BSPS ini sudah sangat maksimal hal ini terlihat dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan baik di internal pelaksana program seperti penerima bantuan, TFL Korkab dan Kementerian PUPR maupun bagi pihak luar eksternal yang ikut mengawasi dan mengevaluasi juga seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tokoh masyarakat, dan lain sebagainya
5. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling baik adalah dalam tahap pengambilan manfaat karena semua tahapan dalam pengambilan manfaat dapat dirasakan secara langsung dan diterima dengan baik. Pengambilan manfaat tersebut adalah adanya pembukaan lapangan kerja bagi warga sekitar yang berprofesi sebagai tukang bangunan, tingkat konsumsi dan kebutuhan selama program BSPS berjalan juga dirasakan oleh para pelaku UMKM yang menyuplai kebutuhan program BSPS, sebagai contoh UMKM Kuliner untuk konsumsi pekerja, UMKM perajin kayu kusen dan UMKM lainnya. Dari segi sosial juga manfaatnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan rasa kegotongroyongan yang akhir-akhir ini makin memudar. Serta dampak pengambilan manfaat secara pribadi bagi penerima BPS adalah terbangunnya rumah yang sehat, layak huni, aman, dan nyaman untuk dihuni dengan mencapai standar 4 indikator SDG's yaitu ketahanan bangunan, kecukupan ruang, sanitasi dan akses air minum serta aspek kesehatan lainnya berupa pencahayaan dan penghawaan yang memenuhi standar kesehatan.

Namun tingkat partisipasi yang paling buruk adalah dalam tahapan pelaksanaan, karena masyarakat dari awal sudah mengeluh tidak memiliki cukup banyak swadaya, hal ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan yaitu berupa direkrutnya para tukang yang tidak profesional karena merekrut tukang dadakan dari tetangga atau saudara asalkan ada tukang dan mau dibayar minim dan belakangan. Pembangunan rumah ada yang mangkrak karena pencairan anggaran upah tukang yang lambat dan penerima bantuan pun sangat minim swadaya hanya mampu memberikan DP, sedangkan pekerja membutuhkan gaji yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Pembelian barang material pun sangat terbatas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pembangunan yang sesuai prosedur bahkan beberapa penerima justru membeli barang material bekas dan bahkan barang yang tidak sesuai standar konstruksi sehingga mengurangi tingkat keandalan dan ketahanan bangunan BPS.

6. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BPS di Desa Sukamakmur yaitu:
 - a. keterbatasan anggaran pembangunan rumah,
 - b. status tanah dari para calon penerima BPS sehingga memicu terhambatnya penetapan penerima BPS dan pelaksanaan pembangunan fisik yang lambat.
 - c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam prosedur pembangunan rumah yang layak huni, serta
 - d. kurangnya koordinasi yang dilakukan antara para pelaksana program BPS.
 - e. banyaknya calon penerima bantuan yang menolak atau mengundurkan diri program BPS karena tidak memiliki swadaya sama sekali
7. Upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak terkait untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memancing penerima bantuan untuk mengeluarkan swadaya mereka baik berupa uang, tenaga tukang, hewan peliharaan maupun barang material yang masih bisa digunakan kembali.
- b. Terkait status tanah TFL harus tegas dan membuatkan berita acara surat pernyataan maupun surat keterangan kepemilikan status tanah tersebut agar pelaksanaan pembangunan rumah tidak melanggar aturan.
- c. Sedangkan terkait kuota tambahan memang perlu adanya program yang berkelanjutan karena jumlah penduduk yang tinggal dirumah yang tidak layak huni sangat banyak sehingga perlu kerjasama yang baik
- d. melakukan kordinasi yang baik pula dari tingkat desa, kecamatan, pemerintah daerah pemerintah pusat serta para fasilitator program BSPS.
- e. melakukan penyuluhan dan pendampingan yang maksimal dengan memberikan konsultasi konstruksi agar anggaran BSPS dapat dipergunakan secara maksimal dalam membangun rumah BSPS.

1.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan tesis ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar dalam program ini agar diperbanyak sosialisasi, penyuluhan atau pendampingan kepada penerima bantuan, meskipun sedang pandemi covid-19 bisa disiasati dengan melakukan rapat atau penyuluhan dengan cara door to door sehingga tidak menimbulkan kerumunan orang tapi bisa mengena kepada penerima bantuan dan tukang nya secara langsung dan efektif.
2. Peneliti menyarankan agar persiapan dan perencanaan pembangunan rumah BSPS ini dilakukan seccara matang dan terukur, baik dari segi penggunaan

anggaran yang efisien, peningkatan kemampuan tukang sesuai kaidah konstruksi, pemahaman penerima bantuan dalam arti pentingnya rumah tidak layak huni. Baik dari segi kualitas konstruksi pembangunan rumah, terbangunnya fasilitas sanitasi dan akses air minum dan mau mengikuti prosedur program BSPS dari awal tahapan perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi.

3. Peneliti menyarankan pengambilan manfaat agar terus dimaksimalkan dengan cara merekrut tenaga kerja lokal, peningkatan kualitas tenaga tukang, penyerapan produk-produk UMKM maupun produk material bahan bangunan yang ada disekitar lokasi pembangunan rumah BSPS tersebut serta adanya pembinaan dan pemeliharaan rumah BSPS agar dapat dihuni dalam jangka waktu yang lama.
4. Peneliti menyarankan adanya evaluasi yang rutin dan efektif dalam setiap tahapan maupun setiap periode waktu tertentu misalnya mingguan atau bulanan dari berbagai pihak agar pelaksanaan kontrol dan evaluasi tidak hanya sebagai ajang kegiatan seremoni biasa saja.
5. Peneliti menyarankan ada penambahan anggaran Program BSPS, karena rata-rata hambatan dan kendala yang dialami masyarakat penerima bantuan adalah keterbatasan dana. Bisa berkisar antara 30-40 juta per unit.
6. Peneliti menyarankan agar ada opsi tambahan dana ekstra untuk pembelian tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah hak milik. Karena dilapangan sangat banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah namun rumahnya sangat tidak layak huni.
7. Peneliti menyarankan agar kuota unit rumah BSPS terus ditambah dan menyebar keseluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya

diwilayah yang memiliki penduduk yang miskin ekstrim serta program ini terus berkelanjutan guna meningkatkan program pengentasan kemiskinan ekstrim.

8. Peneliti menyarankan adanya kegiatan yang dibuat untuk memicu swadaya dan partisipasi masyarakat secara kolektif dalam melaksanakan program BSPS.